

## Pengaruhnya terhadap Hukum dan Etika melalui Penerapan Syari'at Islam di Kerajaan Riau-Lingga abad ke -19

Asep Achmad Hidayat<sup>1</sup>, Syofiah Pribadi<sup>2\*</sup>, Fitria Eka Dewi Murni<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

✉ [syofiah.pribadi76@gmail.com\\*](mailto:syofiah.pribadi76@gmail.com)

### Abstract

This research explores the influence of Islamic teachings on the legal and ethical aspects of the Riau-Lingga Kingdom in the 19th Century. The influence of Islamic teachings occurred through teachings sourced from the book of Furu' Al-Makmur. As a cultural heritage, it is a legal or historical work and a moral guide for the community. Through qualitative analysis, this study shows that the book not only sets out legal rules, but also creates an ethical foundation that influences the daily character of the people. Values such as honesty, mutual cooperation, and obedience to the law emerged as the main pillars of a fair and harmonious government system in the Riau-Lingga Kingdom. The contribution of this research is not only on historical understanding, but also on appreciation of human and cultural values that are still relevant today. The teachings of Islamic shari'a in Kitab Furu' Al-Makmur of contemporary relevance offer valuable guidance for modern society in applying moral principles in daily life.

**Keywords:** Islamic Law, Riau-Lingga Kingdom, 19th Century

Diterbitkan oleh  
ISSN

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar  
2622-5212

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



### PENDAHULUAN

Kerajaan Melayu Riau secara umum dianggap sebagai kelanjutan dari warisan Sriwijaya yang mendominasi wilayah Sumatera Tengah dan Selatan sejak tahun 517 hingga 683 Masehi. Pada awalnya, wilayah ini dikuasai oleh Kerajaan Bintan-Tumasik pada abad ke-12 sampai ke-13 Masehi, yang kemudian menjadi bagian dari zaman Malaka pada abad ke-14 sampai ke-15 Masehi. Selanjutnya, Kerajaan Johor-Kampar memegang kendali pada abad ke-16 sampai ke-17 Masehi, sebelum bergeser ke Kerajaan Riau-Lingga pada abad ke-18 sampai ke-19 Masehi (Ulya, 2020). Pada setiap fase kekuasaan ini, terjadi transisi pemerintahan yang mencakup perubahan nama dan perpindahan pusat pemerintahan, mencerminkan evolusi politik dan dinamika kekuasaan di wilayah tersebut. Seiring berjalannya waktu, Kerajaan Melayu Riau menampilkan perkembangan yang melibatkan berbagai kerajaan Melayu berurutan, tetapi tetap menggambarkan kelanjutan dan pengaruh dari peradaban Sriwijaya (Hafiz & Tafsiruddin, 2022). Dalam sejarahnya, nilai-nilai keislaman menjadi landasan pemerintahan, dengan mahkamah kerajaan dipimpin oleh para ulama yang merumuskan hukum berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Dampak dari perjalanan sejarah ini terlihat dalam struktur dan budaya masyarakat Melayu, menciptakan landasan yang kuat bagi keberlanjutan keberagaman dan kekayaan sejarah di wilayah tersebut (Mohamad Ali & Ariffin, 2020).

Menurut catatan sejarawan, Kerajaan Riau-Lingga-Johor dan Pahang memiliki sejarah yang panjang yang bermula dari Kerajaan Bintan pada abad ke-12 M. Pusat kekuasaan kemudian berpindah dari Bintan ke Temasik-Singapura, dan selanjutnya ke Malaka yang terkenal sebagai Melayu Malaka pada abad ke-14. Serangan Portugis pada

tahun 1511 memaksa pemindahan ke Bintan, lalu ke Kampar pada tahun 1528. Di bawah kepemimpinan Sultan Mahmud Ri'ayat Syah (1761-1812 M), kerajaan mencapai puncak kemajuan dengan berhasil menolak penjajah Belanda. Pusat kekuasaan kemudian dipindahkan ke Lingga, yang mengalami kemajuan dalam bidang budaya dan peradaban (Natuna & Sabli, 2022). Sultan Mahmud berhasil membawa kerajaan ini mencapai kejayaan, terutama dalam sektor ekonomi dan perdagangan dunia. Prestasi ini membuat Lingga diakui sebagai Bunda Tanah Melayu, menandai kesuksesan gemilang kerajaan tersebut (Rahmat, 2019).

Sejarah telah menuliskan bahwa pendirian Kerajaan Riau-Lingga terkait erat dengan campur tangan Belanda dan Inggris dalam konflik internal keluarga kerajaan Riau-Johor pada awal abad ke-19. Peristiwa ini bermula ketika Sultan Johor, Mahmud Syah III, wafat pada tahun 1811 M, sementara putranya Husin berada di luar Johor. Keadaan kekosongan kepemimpinan ini menjadi pangkal terjadinya konflik. Dalam situasi tersebut, adik tiri Husin, Abdul Rahman Muadzam Syah, diangkat sebagai Sultan Johor dengan dukungan Belanda, dan memerintah hingga tahun 1819 M (Anastasia Wiwik Swastiwi, 2021). Kebijakan ini mengecewakan Husin, yang akhirnya dimanfaatkan oleh Inggris. Inggris menetapkan Husin sebagai sultan, dan sebagai gantinya, Husin memberikan konsesi atas Singapura kepada Inggris (Asep Ahmad Hidayat, Samsuddin, Rusmana, & Hakim, 2014). Sementara itu, Abdul Rahman diangkat sebagai Raja di Riau-Lingga sebagai tindakan "budi baik Belanda." Campur tangan kedua kekuatan Eropa ini—Belanda dan Inggris—mempunyai dampak besar terhadap dinamika politik dan wilayah di Riau-Johor pada periode tersebut. Penetapan Husin sebagai sultan oleh Inggris dan pemberian jabatan Raja di Riau-Lingga kepada Abdul Rahman oleh Belanda menciptakan situasi yang kompleks, memperlihatkan pengaruh Eropa dalam mengatur politik dan wilayah di wilayah tersebut. Kejadian ini tidak hanya memengaruhi pembentukan Kerajaan Riau-Lingga, tetapi juga mencerminkan intervensi dan manipulasi kekuasaan Eropa dalam urusan internal kerajaan Melayu pada masa tersebut (Koestoro, 2017).

Berkembangnya tradisi pemikiran Islam di Kesultanan Riau-Lingga erat kaitannya dengan peran pemerintah, di mana sebagian dari mereka adalah individu yang taat beragama. Pemerintah dan negara memiliki peran penting sebagai patron dan pendukung utama dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pembentukan aktivitas intelektual (Rina Rehayati, 2017). Pernyataan ini dianggap sebagai fakta yang tercatat dalam sejarah. Banyak ulama dan guru, baik yang berasal dari dalam maupun luar Nusantara, datang untuk memberikan kontribusi dan memperkaya proses belajar mengajar di Kerajaan Melayu Riau (A. A Hidayat, 2014). Dengan kata lain, pada periode tersebut, pemerintah dan negara di Kerajaan Melayu Riau berperan aktif dalam memberikan dukungan terhadap kegiatan intelektual. Hal ini mencakup pengundangan ulama dan guru dari berbagai wilayah, menciptakan suasana kondusif untuk pertukaran pengetahuan dan pengembangan aktivitas intelektual di kerajaan tersebut. Dukungan penuh dari pemerintah dan negara menciptakan lingkungan yang mendukung pertukaran pengetahuan dan ide, memberikan kemungkinan bagi berkembangnya aktivitas intelektual di wilayah tersebut. Kehadiran ulama dan guru dari berbagai tempat juga berkontribusi pada pengayaan wawasan dan pemahaman masyarakat setempat, menjadikan Kerajaan Melayu Riau sebagai pusat keilmuan yang berkembang dan dinamis. Adanya dukungan dari pemerintah tidak hanya menciptakan lingkungan akademis yang subur tetapi juga menunjukkan komitmen dalam memajukan pemikiran Islam di wilayah tersebut. Sehingga, Kesultanan Riau-Lingga menjadi pusat kegiatan intelektual dan pemikiran Islam yang berperan penting dalam perkembangan budaya dan agama di Nusantara. Malah disebutkan, bahwa Sultan Abdul Rahman I (1812-1834 M) adalah orang yang selalu memakai jubah Arab, dan senantiasa didampingi para ulama dan sayyid. Baginda sultan tersebut dikenal sebagai orang yang taat beribadah (Syu'aib & Hanafi, 2019).

Ketika itu, Sultan Abdul Rahman dengan senang hati mendedikasikan waktunya untuk beribadah di negeri Lingga, baik pada malam maupun siang hari. Pada awal pemerintahannya, Baginda adalah seorang raja yang sangat tekun dalam beribadah. Setiap malam Jumat, Baginda tidak pernah berhenti beribadah dan sepenuhnya fokus pada aktifitas keagamaan. Di siang harinya, Baginda rajin menunaikan salat Jumat dengan mematuhi tradisi Arab. Selain itu, Sultan Abdul Rahman memiliki kecenderungan untuk bersosialisasi dengan para tuan sayyid dan syeikh. Baginda senang berbagi hidangan makanan dan minuman dengan mereka, serta menunjukkan rasa bangganya dengan diri sendiri. Suara Baginda terkenal sangat keras dan gagah.

Kemudian upaya Kesultanan Riau-Lingga untuk menegaskan kepatuhan pemerintahannya terhadap syariat Islam juga tercermin dalam langkah-langkah konkret, seperti penunjukan penasihat kerajaan dengan latar belakang keilmuan Islam. Raja Ali bin Ja'far, sebagai bagian dari inisiatif tersebut, mengangkat Haji Hamim dari Banjar sebagai penasihat kerajaan. Keputusan ini menunjukkan komitmen untuk melibatkan individu yang memiliki pemahaman mendalam tentang nilai-nilai Islam dalam lingkup pemerintahan. Selain itu, kehadiran Raja Ali Haji, yang merupakan sepupu Raja Ali bin Ja'far, sebagai bagian dari pemerintahan juga dapat memberikan tambahan dimensi keilmuan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam dalam struktur kepemimpinan Kesultanan Riau-Lingga. Ini mencerminkan usaha kesultanan dalam menciptakan landasan pemerintahan yang sesuai dengan ajaran agama Islam (Jannati, Rusli, & Mardiah, 2021). Raja Ali Haji menggambarkan sekelumit penerapan syariat Islam di masa tersebut dalam karyanya Tuhfat al-Nafis (Lazim, 2020).

Pada masa ini, kerajaan mendirikan agama Islam: mendirikan jum'atan dan memerintahkan perempuan *bertudong*. Melarang segala orang jahat-orang jahat seperti berjudi dan menyabung, dan jika ada orang jahat-orang jahat perampok dihukum, terkadang dibuang, terkadang dibunuhnya, dikerat kepalanya, dan beberapa kali hal yang demikian itu, supaya yang lainnya mengambil insaf (Jannati et al., 2021). Meskipun Belanda melakukan penjajahan, terlihat bahwa mereka tidak menghalangi sepenuhnya kegiatan keagamaan yang berkembang di wilayah tersebut. Pada kala itu Snouck Hurgronje, seorang orientalis Belanda yang mengusulkan bahwa lawan kolonialisme bukanlah Islam sebagai agama, tetapi Islam sebagai doktrin politik. Snouck Hurgronje membedakan antara Islam dalam konteks "ibadah ritual" dan Islam sebagai "kekuatan sosial politik". Pendekatannya terhadap penduduk pribumi, dalam hal ini di Kerajaan Riau-Lingga, melibatkan klasifikasi Islam ke dalam tiga kategori: bidang agama murni atau ibadah, bidang sosial kemasyarakatan, dan bidang politik (Handoyo & Supriyanto, 2023). Pandangan ini menyiratkan bahwa setiap bidang memerlukan solusi alternatif yang berbeda. Meskipun Belanda memiliki kendali atas wilayah tersebut, mereka tampaknya mempertahankan kerangka pemahaman yang memungkinkan kelangsungan kegiatan keagamaan di Kerajaan Riau-Lingga. Dengan kata lain, meskipun Belanda menjalankan kontrol politik, mereka tidak secara totalitar menghalangi aspek-aspek keagamaan, dan pemahaman mereka tentang peran Islam dalam masyarakat memungkinkan keberlanjutan praktik keagamaan.

Pada masa tersebut, aktivitas tulis menulis sangat terkait dengan keberadaan percetakan dan perpustakaan yang berperan penting dalam mendorong dan mendukung penulisan. Kesadaran akan kekuatan percetakan sebagai alat untuk menyebarkan karya dan mengatasi batas ruang dan waktu telah menjadi jelas. Pada tahun 1894, inisiatif dari Yang Dipertuan Muda Riau, Raja Muhammad Yusuf al-Ahmadi, mengejawantahkan konsep ini dengan mendirikan Mathba'at al-Riauwiyyah atau Percetakan Riau di Pulau Penyengat. Percetakan ini juga dikenal sebagai Mathba'at al-Ahmadiyah, merujuk pada nama raja yang menjadi pendirinya. Pendirian Percetakan Riau ini mencerminkan komitmen untuk meluaskan akses terhadap pengetahuan dan budaya melalui media cetak. Fungsi percetakan ini bukan hanya sebagai tempat mencetak, tetapi juga sebagai pusat intelektual yang berperan penting dalam menyebarkan ide dan informasi di wilayah Kesultanan Riau-

Lingga. Dengan mendirikan percetakan, Raja Muhammad Yusuf al-Ahmadi menunjukkan kesadaran akan pentingnya peran media cetak dalam mengedukasi dan menyebarkan gagasan di tengah masyarakat.

Pada abad ke-19, periode sejarah yang kaya dengan dinamika sosial, ekonomi, dan politik, Kerajaan Riau-Lingga menyajikan sebuah lanskap unik yang mencerminkan keberagaman budaya dan pengaruh ajaran agama Islam yang kuat (Yulianty, 2005). Salah satu karya penting yang merefleksikan kehidupan masyarakat pada masa itu adalah kitab *Furu' al-Makmur*. Kitab ini tidak hanya menjadi panduan hukum, tetapi juga merangkum etika dan nilai-nilai moral yang mengatur kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, penelitian ini akan mengeksplorasi pengaruh ajaran Islam dalam kitab *Furu' al-Makmur*, dengan fokus khusus pada aspek hukum dan etika di Kerajaan Riau-Lingga pada abad ke-19. Era ini diwarnai oleh perubahan signifikan dalam sistem politik dan perkembangan budaya yang mendalam, sehingga memahami bagaimana ajaran Islam memberikan sumbangan terhadap pembentukan struktur sosial, hukum, dan moral menjadi sangat penting.

Kitab *Furu' al-Makmur*, sebagai penjelasan rinci dari ajaran Islam, memberikan gambaran yang kaya tentang bagaimana masyarakat Riau-Lingga pada waktu itu menjalankan tata kehidupan mereka berdasarkan prinsip-prinsip agama. Analisis mendalam terhadap aspek hukum dan etika dalam kitab ini dapat mengungkap bagaimana norma-norma Islam diterapkan dalam konteks kehidupan sehari-hari, serta bagaimana interpretasi dan adaptasi lokal terhadap ajaran agama ini membentuk perilaku dan kebijakan masyarakat. Penelitian ini juga relevan mengingat peran penting Kerajaan Riau-Lingga sebagai pusat keagamaan dan perdagangan di wilayah tersebut. Pengaruh Islam tidak hanya terasa dalam ranah spiritual, tetapi juga mencorak tatanan sosial dan politik, khususnya melalui sistem hukum dan etika yang diakui dan dihormati oleh masyarakat. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap bagaimana ajaran Islam tercermin dalam kitab *Furu' al-Makmur* akan memberikan kontribusi yang berharga untuk memahami dinamika kehidupan masyarakat pada masa lalu dan melihat bagaimana nilai-nilai ini mungkin berlanjut hingga ke zaman sekarang.

## **METODE**

Penelitian ini akan mengadopsi pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam pengaruh ajaran Islam dalam kitab *Furu' al-Makmur* terhadap aspek hukum dan etika di Kerajaan Riau-Lingga pada abad ke-19 (Lexy J.Moleong, 2019). Pendekatan kualitatif dianggap paling sesuai untuk menggali konteks historis dan budaya yang mendasari penulisan kitab, sekaligus memahami interpretasi dan implementasi ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Pertama-tama, studi pustaka akan melibatkan tinjauan literatur untuk mendapatkan pemahaman awal tentang ajaran Islam, sejarah Kerajaan Riau-Lingga, dan konteks kebudayaan abad ke-19. Selanjutnya, analisis kitab *Furu' al-Makmur* akan dilakukan melibatkan pembacaan teliti untuk mengidentifikasi passages yang berkaitan dengan aspek hukum dan etika, dengan menggunakan pendekatan hermeneutika untuk memahami konteks dan interpretasi kitab. Wawancara akan menjadi elemen kunci, termasuk interaksi dengan ahli sejarah dan keagamaan lokal, serta tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan atau pengalaman tentang tradisi, hukum adat, dan implementasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari (Firmansyah & Dede, 2022). Data dari wawancara dan literatur kemudian akan dianalisis secara tekstual untuk mengidentifikasi tema-tema utama terkait pengaruh ajaran Islam dalam aspek hukum dan etika di Kerajaan Riau-Lingga. Hasil analisis akan diinterpretasikan untuk merinci pengaruh ajaran Islam dalam kitab *Furu' al-Makmur* terhadap hukum dan etika di Kerajaan Riau-Lingga. Selanjutnya, kesimpulan akan dirumuskan berdasarkan temuan-temuan, mengevaluasi signifikansi hasil, dan menyusun gambaran komprehensif tentang peran Islam dalam membentuk tatanan sosial dan hukum pada abad ke-19 di Kerajaan Riau-

Lingga. Metode ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis untuk pemahaman sejarah serta nilai-nilai yang mempengaruhi masyarakat Islam pada masa sekarang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Syariat Islam dalam Kitab *Furu' Al-Makmur* di Kerajaan Riau-Lingga

Kitab *Furu' Al-Makmur* menjadi jendela penting untuk memahami peranan Syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan tata pemerintahan Kerajaan Riau-Lingga pada abad ke-19. Kitab *Furu' Al-Makmur* memiliki peran sentral dalam mencerminkan struktur pemerintahan dan tata kelola administratif Kerajaan Riau-Lingga. Judulnya yang berasal dari bahasa Arab, dengan "Furu'" sebagai cabang dan "Makmur" sebagai pejabat atau petugas, memberikan gambaran tentang fokus utama kitab tersebut. Dengan arti harfiah "Cabang-Cabang Kemakmuran" atau "Pedoman bagi Pejabat", kitab ini disusun pada tahun 1895 sebagai panduan teknis bagi pejabat di berbagai tingkatan pemerintahan (Rafiqi, 2019). Pentingnya kitab ini terletak pada perannya sebagai sumber pedoman yang merinci aturan dan tata cara administratif pada masa Kerajaan Riau-Lingga (Sucipta, 2019). Dengan kata lain, Kitab *Furu' Al-Makmur* bukan hanya sekadar kumpulan instruksi, melainkan juga mencerminkan filosofi dan pandangan pemerintahan pada waktu masanya (Hidayat, 2008). Isinya kemungkinan mencakup berbagai aspek, seperti organisasi birokrasi, tata kelola, dan tanggung jawab pejabat (Lancang & Riau, 2016). Sebagai bagian integral dari sejarah Kerajaan Riau-Lingga, kitab ini menyajikan warisan budaya yang mencerminkan bagaimana masyarakat pada masa itu berusaha membangun dan mempertahankan struktur pemerintahan mereka (Halim & Alpi, 2023). Dengan demikian, Kitab *Furu' Al-Makmur* bukan hanya memperkuat basis administratif, tetapi juga memberikan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang membimbing pemerintahan pada masanya (Wan Ahmad Fauzi Wan Husain, Anisah Che Ngah, & Mohamed Anwar Omar Din, 2018).

Kitab *Furu' Al-Makmur* ditulis pada tahun 1895, memegang peran sentral dalam membentuk struktur dan operasional pemerintahan Kerajaan Riau-Lingga pada masanya. Sebagai sebuah manual aturan dan petunjuk teknis, kitab ini memberikan wawasan mendalam mengenai berbagai aspek administratif yang esensial bagi para pejabat di berbagai tingkatan.



Gambar 1. Kitab *Furu' Al-Makmur* Kerajaan Riau-Lingga

Pertama-tama, kitab ini menyajikan gambaran yang terperinci mengenai struktur pemerintahan. Menjelaskan hierarki jabatan, fungsi, dan tanggung jawab departemen serta pejabat, kitab ini membentuk dasar yang kokoh untuk organisasi birokrasi Kerajaan Riau-Lingga (Civilization, TEMA 19, & Domenico, 2021). Sebagai sebuah karya hukum, Kitab Furu' Al-Makmur juga memuat ketentuan-ketentuan mengenai perundang-undangan. Hal ini melibatkan aturan hukum, prosedur peradilan, dan sanksi terhadap pelanggaran, menandakan keberlanjutan dan konsistensi dalam penerapan hukum di kerajaan tersebut. Pengelolaan keuangan juga menjadi fokus dalam kitab ini. Sistem pajak, pengeluaran kerajaan, dan distribusi sumber daya diuraikan secara rinci, menciptakan dasar bagi kebijakan keuangan yang efisien dan transparan (Htn & Han, 2021). Selain itu, kitab ini membahas hubungan pemerintahan dengan daerah taklukan. Menyediakan panduan terkait tata cara pemerintahan di wilayah jajahan, kitab ini mencerminkan kompleksitas administratif dalam mengelola entitas-entitas yang berada di bawah kendali Kerajaan Riau-Lingga. Kitab Furu' Al-Makmur menetapkan standar etika dan perilaku bagi pejabat pemerintahan. Menekankan kewajiban, larangan, dan nilai-nilai seperti kejujuran, pengabdian, dan pencegahan korupsi, kitab ini memberikan fondasi moral untuk pelaksanaan tugas pemerintahan (Dinda, Bina Imania, & Penulis, 2022). Dengan merinci aspek-aspek tersebut, kitab ini tidak hanya sekadar manual administratif, melainkan juga sebuah dokumen kaya nilai sejarah yang mencerminkan upaya pemerintahan Kerajaan Riau-Lingga dalam membangun dan mempertahankan sistem pemerintahan yang efektif dan adil pada akhir abad ke-19.

Kitab Furu' Al-Makmur selain mencakup aspek-aspek seperti struktur pemerintahan, hukum, keuangan, dan etika pejabat, ternyata juga menyertakan pedoman yang khusus terkait dengan hubungan antara Sultan dan para pejabatnya (Maryamah, 2016). Dalam hal ini, kitab ini berfungsi sebagai panduan yang mengatur dinamika dan tata cara interaksi antara kepala negara, yaitu Sultan, dengan para pejabat di berbagai tingkatan. Pedoman ini mungkin merinci sejumlah hal yang krusial untuk menjaga ketertiban dan kelancaran pemerintahan. Pertama-tama, kitab mungkin mengatur hak dan tanggung jawab Sultan, menetapkan batas kekuasaan, serta memberikan panduan tentang bagaimana keputusan-keputusan strategis sebaiknya diambil dan diimplementasikan. Di sisi lain, terdapat juga pedoman untuk para pejabat yang mungkin mencakup aspek loyalitas, kewajiban, dan etika dalam melaksanakan tugas mereka. Memastikan bahwa para pejabat menjalankan tugas mereka dengan baik dan setia kepada Sultan merupakan langkah penting dalam memelihara stabilitas dan konsistensi dalam pemerintahan (Tabri, Fatia, & Hakim, 2023).

Selain itu, kitab ini mungkin juga mengandung informasi mengenai tata cara pelaporan kepada Sultan, bagaimana Sultan berinteraksi dengan para pejabat dalam pengambilan keputusan, serta mekanisme komunikasi yang efektif antara kepala negara dan administrasi. Pedoman ini bukan hanya menjaga kewibawaan Sultan, tetapi juga mengarahkan para pejabat untuk bekerja sesuai dengan tujuan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Secara keseluruhan, penambahan dimensi ini dalam Kitab Furu' Al-Makmur memberikan pandangan lebih lengkap tentang tatanan pemerintahan dan hubungan kekuasaan di Kerajaan Riau-Lingga (Rahmat et al., 2021).

Kitab Furu' Al-Makmur bukan hanya merupakan kumpulan aturan administratif yang kaya informasi, melainkan juga sebuah artefak berharga dengan nilai sejarah tinggi. Bagi para peneliti di bidang sejarah, budaya, dan politik, kitab ini menjadi sumber yang tak ternilai untuk memahami sistem pemerintahan, hukum, dan administrasi Kerajaan Riau-Lingga pada transisi akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Dalam kedalaman isi kitab, terungkap wawasan yang mendalam mengenai struktur pemerintahan, perspektif hukum, dan administratif yang mendominasi masa tersebut. Informasi tentang struktur keuangan dan pengelolaan sumber daya memberikan gambaran jelas tentang kebijakan ekonomi dan

prioritas keuangan kerajaan. Kitab ini juga memperlihatkan dinamika hubungan pemerintahan dengan daerah taklukan, mencerahkan cara administrasi diterapkan di wilayah jajahan kerajaan (Khobiburrohma, Khobiburrohma, Margareta, & Hasbullah, 2020). Selain itu, pedoman etika dan perilaku pejabat memberikan pandangan mendalam tentang nilai-nilai masyarakat dan bagaimana norma-norma ini tercermin dalam tugas-tugas pemerintahan. Dengan demikian, Kitab Furu' Al-Makmur bukan hanya menjadi sumber informasi praktis, melainkan sebuah jendela menuju sejarah yang memungkinkan peneliti untuk menggali kehidupan dan pemerintahan Kerajaan Riau-Lingga pada periode yang sangat signifikan.

Kitab Furu' Al-Makmur bukan hanya sekadar dokumen sejarah atau petunjuk administratif, melainkan sebuah warisan budaya yang berharga bagi masyarakat Riau dan Indonesia secara keseluruhan. Selain menyimpan pengetahuan yang bernilai tentang tatanan pemerintahan kuno, kitab ini juga menjadi penjaga nilai-nilai yang membangun karakter masyarakat. Dalam aspek tersebut, kitab ini bukan hanya menjadi sumber informasi mengenai hierarki jabatan, hukum, dan administrasi pada masa lalu, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai etika yang relevan hingga saat ini. Konsep kesetiaan terhadap Sultan, tanggung jawab dalam menjalankan tugas pemerintahan, dan prinsip keadilan yang terdapat dalam Kitab Furu' Al-Makmur membentuk bagian integral dari warisan budaya yang diterima dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Selain itu, nilai-nilai yang terdapat dalam kitab ini dapat memberikan inspirasi dan arahan bagi generasi mendatang. Konsep-konsep seperti kesetiaan, tanggung jawab, dan keadilan tidak hanya relevan dalam konteks sejarah, tetapi juga membentuk landasan moral yang tetap berarti dalam kehidupan sehari-hari (Jaenullah, Ferdian Utama, 2022). Dengan demikian, Kitab Furu' Al-Makmur bukan hanya menjadi saksi sejarah, melainkan juga menjelma menjadi panduan nilai-nilai budaya yang dapat terus menginspirasi dan membimbing masyarakat Riau dan Indonesia dalam menjalani kehidupan mereka. Sebagai warisan budaya, kitab ini memiliki peran yang mendalam dalam membentuk identitas dan karakter masyarakat, menjadikannya sebuah harta yang tak ternilai dalam perjalanan budaya Indonesia (Syamsuadi, 2018).

### **Aspek Hukum dan Etika pada Abad ke-19 di Kerajaan Riau-Lingga melalui Syariat Islam dalam Kitab Furu' Al-Makmur**

Kitab Furu' Al-Makmur, sebagai karya monumental abad ke-19, memiliki peran yang lebih dari sekadar manual administratif bagi Kekaisaran Riau-Lingga. Kitab ini juga berfungsi sebagai jendela yang membuka pandangan kita terhadap tatanan hukum dan etika yang mengatur kehidupan masyarakat pada masa tersebut. Dalam keberadaannya, kitab ini bukan hanya menjadi sumber aturan, tetapi juga sebuah dokumentasi berharga mengenai aspek-aspek moral dan normatif pada era yang berlalu. Melalui lensa Kitab Furu' Al-Makmur, kita dapat menjelajahi tatanan sosial pada masa tersebut dan bagaimana keadilan ditegakkan.

#### ***Hukum***

Informasi tentang hukum dan perundang-undangan yang terkandung di dalamnya memberikan gambaran tentang bagaimana sistem peradilan bekerja, serta bagaimana norma-norma hukum diterapkan dalam praktik sehari-hari. Selain itu, kitab ini juga menjadi saksi nilai-nilai moral yang dipegang teguh oleh masyarakat pada masa tersebut. Etika yang tercermin dalam pedoman untuk para pejabat mencakup nilai-nilai seperti kesetiaan, tanggung jawab, dan keadilan, yang menjadi fondasi moral bagi pemerintahan dan masyarakat (Samin, 2017). Dengan demikian, Kitab Furu' Al-Makmur bukan hanya sebuah artefak sejarah administratif, tetapi juga suatu pintu gerbang bagi pemahaman kita terhadap moralitas dan etika dalam konteks kehidupan masyarakat Kekaisaran Riau-Lingga pada abad ke-19 (Siregar, 2023). Sebagai sebuah jendela sejarah, kitab ini memberikan

wawasan yang berharga untuk memahami lebih dalam nilai-nilai dan norma yang membentuk karakter masyarakat pada masa tersebut (Fakhriah, Taufiq, Qosim, 2023).

Kitab Furu' Al-Makmur memberikan gambaran yang jelas tentang penerapan sistem hukum dualistis di dalam kerajaan, mencerminkan dinamika dan kompleksitas dalam bidang hukum. Sistem ini menunjukkan adanya keseimbangan antara hukum Islam (Syariah) dan hukum adat lokal, yang secara bersama-sama mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat di Kerajaan Riau-Lingga. Dalam hal hukum Islam, kitab ini mencatat peran sentralnya dalam mengatur berbagai bidang, termasuk perdata, pidana, dan keluarga. Prinsip-prinsip hukum Islam diterapkan untuk memberikan panduan dan penyelesaian dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari. Di samping itu, kitab ini juga menyajikan penerapan hukum adat setempat, yang secara khusus digunakan untuk mengatur urusan tertentu seperti pertanahan, kelautan, dan perdagangan. Penerapan hukum adat mencerminkan sikap kerajaan yang menerima dan mengakomodasi kearifan lokal, mengakui keberagaman etnis, dan menyesuaikan aturan hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat (Politik et al., 2024). Dengan adanya dualisme hukum tersebut, Kerajaan Riau-Lingga tidak hanya menunjukkan kepatuhan terhadap ajaran Islam yang memegang peran dominan, tetapi juga menghormati dan mengakui nilai-nilai dan praktik-praktik lokal yang telah tertanam dalam kehidupan masyarakatnya. Ini menciptakan suatu bentuk harmoni antara hukum Islam yang bersifat umum dan hukum adat yang bersifat lokal dan khusus. Melalui konsep dualisme hukum, Kitab Furu' Al-Makmur menjadi bukti konkret tentang bagaimana kerajaan pada masa tersebut mampu mengelola keragaman hukum dan etnis, menciptakan kerangka kerja yang inklusif dan seimbang dalam tatanan hukumnya.

Kitab Furu' Al-Makmur menggambarkan dengan rinci hierarki dan prosedur hukum yang sangat terstruktur di dalam kerajaan, mencakup berbagai aspek seperti struktur peradilan, alur persidangan, dan sanksi atas pelanggaran. Ketentuan-ketentuan hukum yang tertuang dalam kitab ini tidak hanya sekadar norma hukum, melainkan merupakan panduan operasional yang terperinci bagi sistem peradilan pada masa tersebut. Dalam aspek hierarki, kitab ini menguraikan struktur peradilan, menjelaskan tingkatan dan peran masing-masing lembaga peradilan. Informasi ini menciptakan landasan yang jelas mengenai wewenang dan tanggung jawab setiap tingkatan, memastikan suatu tatanan hierarki yang terstruktur dengan baik.

Selain itu, kitab ini juga menggambarkan alur persidangan yang harus diikuti, mulai dari proses awal hingga penyelesaian. Penekanan pada prosedur ini mencerminkan keinginan untuk menegakkan sistem hukum yang teratur dan adil. Dengan merinci alur persidangan, kitab ini memberikan petunjuk yang sangat terperinci kepada para pelibat hukum untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sanksi atas pelanggaran juga termasuk dalam lingkup ketentuan hukum kitab ini. Dengan menetapkan sanksi yang tegas, kitab ini menunjukkan ketegasan dalam menangani pelanggaran hukum, yang sejalan dengan upaya untuk menjaga keteraturan dan keadilan dalam masyarakat. Kitab Furu' Al-Makmur tidak hanya berfungsi sebagai panduan hukum, tetapi juga sebagai instrumen yang memberikan fondasi kuat untuk menjaga dan menegakkan ketertiban dalam sistem peradilan pada masa Kerajaan Riau-Lingga. Hierarki dan prosedur yang terperinci mencerminkan keinginan untuk menciptakan sistem hukum yang terstruktur dan imparial (Khairunnas Jamal Idris Harun, 2015).

Kitab Furu' Al-Makmur memaparkan beberapa aturan hukum yang menunjukkan kekhasan dan mencerminkan konteks unik Kerajaan Riau-Lingga pada masa itu. Dua contoh aturan yang menonjol adalah aturan mengenai pajak pelabuhan (mahsura) dan hubungan dengan daerah taklukan (raja muda). Aturan mengenai pajak pelabuhan atau "mahsura" mencerminkan pentingnya kegiatan pelayaran dan pelabuhan dalam struktur ekonomi kerajaan. Pajak ini tidak hanya merupakan sumber pendapatan bagi kerajaan tetapi juga mencerminkan peran sentral pelabuhan sebagai pusat perdagangan dan kegiatan ekonomi.

Aturan ini mencerminkan kebijakan yang mendukung dan mengatur sektor maritim sebagai salah satu pilar utama kekuatan ekonomi kerajaan. Sementara itu, aturan yang berkaitan dengan hubungan dengan daerah taklukan, seperti "raja muda," menyoroti peran perluasan wilayah sebagai sumber kekuatan politik dan ekonomi. Aturan ini mungkin merinci tata cara pemerintahan di wilayah-wilayah jajahan, menunjukkan bagaimana kerajaan berinteraksi dan mengelola daerah taklukan sebagai bagian integral dari kekuatan dan pengaruhnya. Kedua aturan ini mencerminkan kesadaran kerajaan akan strategi pelayaran dan perluasan wilayah sebagai fondasi kekuatan ekonomi dan politik mereka. Dengan merinci aturan-aturan ini, Kitab Furu' Al-Makmur memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana kebijakan ekonomi dan politik direfleksikan dalam hukum kerajaan, memahami peran vital pelayaran dan perluasan wilayah dalam membentuk kekuatan dan identitas kerajaan pada masanya.

### ***Etika***

Kitab Furu' Al-Makmur tidak hanya menyajikan aturan hukum semata, melainkan juga memberikan arahan moral yang kuat bagi para pejabat. Dengan memahami dan mematuhi kewajiban moral, diharapkan para pejabat dapat menjalankan tugas mereka dengan integritas, memberikan dasar yang kokoh bagi sistem pemerintahan yang stabil dan adil. Kitab Furu' Al-Makmur mengangkat tema kewajiban para pejabat dengan penekanan yang konsisten pada kualitas moral dan etika. Para pejabat diingatkan secara berulang-ulang akan kewajiban mereka terhadap nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, dan pengabdian kepada Sultan. Poin-poin ini mencerminkan tidak hanya harapan terhadap perilaku pribadi para pejabat, tetapi juga menunjukkan pentingnya integritas dan ketertiban dalam menjaga stabilitas sistem pemerintahan. Dengan menekankan kejujuran, Kitab Furu' Al-Makmur menegaskan nilai-nilai moral yang menjadi dasar integritas dalam pelayanan publik. Kewajiban untuk bersikap jujur tidak hanya dilihat sebagai norma etika, tetapi juga sebagai fondasi yang mendasari hubungan antara pejabat dan Masyarakat (Sucipto, Sitinjak, & Sujatmoko, 2023).

Selain itu, penekanan pada keadilan mencerminkan keinginan untuk memastikan bahwa pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan dilakukan secara adil. Kewajiban terhadap keadilan menciptakan dasar untuk sistem yang inklusif dan merata, yang melayani kepentingan seluruh masyarakat. Pengabdian kepada Sultan juga menjadi salah satu poin penting dalam kewajiban para pejabat. Hal ini menyoroti struktur hierarki dan setia kepada kepala negara sebagai unsur kritis dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan pemerintahan (Pertwi, Folara, Farhana, & Alam, 2022).

Kitab Furu' Al-Makmur menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan melalui ketentuan-ketentuan hukumnya. Meskipun aturan hukum dalam kitab ini tegas, terdapat pertimbangan yang jelas terhadap keadilan dan proporsionalitas hukuman, mencerminkan kesadaran terhadap hak asasi manusia. Ketika menangani pelanggaran hukum, kitab ini menunjukkan kepekaan terhadap prinsip keadilan. Kepentingan untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan bersifat adil dan sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan menciptakan dasar untuk sistem hukum yang menghargai martabat individu. Kemudian penghormatan terhadap adat istiadat lokal dan keragaman etnis mencerminkan sikap toleransi dan inklusivitas dalam kerajaan tersebut. Kitab ini tidak hanya menciptakan landasan hukum yang mengakomodasi keberagaman budaya, tetapi juga memperlihatkan penghargaan terhadap hak-hak dan kebutuhan setiap kelompok etnis dalam masyarakat.

Dengan menyatukan tegasnya aturan hukum dengan prinsip-prinsip kemanusiaan, Kitab Furu' Al-Makmur menciptakan suatu kerangka kerja yang seimbang antara ketegasan hukum dan keberpihakan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Pendekatan ini memberikan pijakan moral yang kuat, memastikan bahwa aturan hukum tidak hanya efektif secara hukum, tetapi juga berpihak pada keadilan dan mengakui hak asasi manusia (Amin, 2023).

Kitab Furu' Al-Makmur tidak hanya berfungsi sebagai kumpulan aturan hukum semata, tetapi juga memainkan peran penting sebagai pedoman moral bagi masyarakat. Melalui penjabaran aturan dan penekanan pada etika, kitab ini secara tidak langsung menyajikan ajaran-ajaran moral yang menjadi pijakan nilai-nilai luhur dalam kehidupan sehari-hari. Penekanan pada kejujuran, misalnya, memberikan pesan moral tentang pentingnya kejujuran sebagai prinsip dasar dalam berinteraksi dan menjalani kehidupan. Dengan memasukkan nilai-nilai seperti gotong royong, kitab ini juga menyuarakan pentingnya kerjasama dan solidaritas dalam masyarakat. Selain itu, kepatuhan terhadap hukum yang diemphasiskan dalam kitab ini menegaskan prinsip-prinsip ketaatan terhadap norma dan aturan, menciptakan dasar moral yang kuat dalam menjaga ketertiban dan keadilan. Dengan menyampaikan ajaran-ajaran moral ini, Kitab Furu' Al-Makmur memberikan panduan bagi masyarakat dalam membentuk karakter yang berlandaskan nilai-nilai positif. Nilai-nilai seperti kejujuran, gotong royong, dan kepatuhan terhadap hukum dihidupkan dan dijunjung tinggi, menciptakan suatu kerangka etika yang membimbing individu dan masyarakat untuk menjalani kehidupan dengan integritas dan tanggung jawab moral.

Hasil penelitian ini membawa temuan yang signifikan terkait dengan hukum dan etika dalam konteks Kerajaan Riau-Lingga pada abad ke-19, sebagaimana diungkapkan dalam Kitab Furu' Al-Makmur. Kitab ini menggambarkan penerapan sistem hukum dualistik yang mencakup hukum Islam (Syariah) dan hukum adat lokal, mencerminkan harmoni antara norma hukum Islam yang bersifat umum dan hukum adat yang bersifat lokal dan khusus. Hierarki dan prosedur hukum yang terstruktur dijelaskan secara rinci, menciptakan landasan yang jelas bagi sistem peradilan pada masa tersebut. Selain itu, kitab mencantumkan aturan hukum yang mencerminkan kekhasan Kerajaan Riau-Lingga, seperti aturan mengenai pajak pelabuhan dan hubungan dengan daerah taklukan. Di sisi etika, Kitab Furu' Al-Makmur tidak hanya memberikan aturan hukum, tetapi juga menekankan arahan moral bagi para pejabat. Penekanan pada nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, dan pengabdian kepada Sultan menegaskan kewajiban moral para pejabat dalam menjalankan tugas mereka. Kitab ini juga menunjukkan kepekaan terhadap hak asasi manusia, dengan mempertimbangkan keadilan dan proporsionalitas hukuman. Dalam kerangka kerja yang seimbang antara ketegasan hukum dan kemanusiaan, Kitab Furu' Al-Makmur tidak hanya memberikan fondasi hukum yang kuat, tetapi juga mengakui nilai-nilai kemanusiaan. Selain berperan sebagai panduan hukum, kitab ini juga menjadi pedoman moral bagi masyarakat. Ajaran-ajaran moral seperti kejujuran, gotong royong, dan kepatuhan terhadap hukum disuarakan sebagai pijakan nilai-nilai luhur dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, Kitab Furu' Al-Makmur tidak hanya merekam praktik hukum pada masanya, tetapi juga membentuk suatu kerangka etika yang memandu individu dan masyarakat menuju kehidupan dengan integritas dan tanggung jawab moral.

Penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman tentang Kerajaan Riau-Lingga pada abad ke-19 melalui analisis Kitab Furu' Al-Makmur. Hasil penelitian melalui kajian mendalam terhadap sistem hukum dualistik membuka wawasan terhadap dinamika penerapan hukum Islam (Syariah) dan hukum adat lokal, menciptakan gambaran yang kaya tentang kompleksitas hukum pada masa kerajaan tersebut. Rekam jejak yang terstruktur dari hierarki dan prosedur hukum memberikan pemahaman mendalam mengenai sistem peradilan, sementara penekanan pada aturan hukum khas seperti pajak pelabuhan dan hubungan dengan daerah taklukan memberikan wawasan ekonomi dan politik yang tercermin dalam hukum kerajaan. Temuan ini menggambarkan dengan jelas interaksi kompleks antara hukum, masyarakat, dan kebijakan pada masa tersebut, memberikan pandangan holistik tentang kerangka hukum dan konteks sosial-ekonomi Kerajaan Riau-Lingga pada periode yang bersangkutan.

## KESIMPULAN

Kitab Furu' Al-Makmur bukan sekadar sebuah karya hukum atau dokumentasi sejarah, melainkan sebuah warisan budaya yang mencerminkan peradaban Kerajaan Riau-Lingga pada abad ke-19. Dalam penjabaran aturan hukum dan penekanan pada etika, kitab ini tidak hanya memberikan pemahaman mendalam tentang struktur pemerintahan dan nilai-nilai luhur, tetapi juga berfungsi sebagai panduan moral bagi masyarakat. Ajaran-ajaran seperti kejujuran, gotong royong, dan kepatuhan terhadap hukum yang terdapat dalam Kitab Furu' Al-Makmur bukan hanya sebatas norma-norma hukum, tetapi menjadi pondasi kuat bagi pembentukan sistem pemerintahan yang adil dan harmonis di Kerajaan Riau-Lingga pada masa itu. Panduan moral yang terkandung dalam kitab ini bukan hanya membatasi diri pada aspek hukum semata, melainkan membentuk karakter masyarakat yang tercermin dalam perilaku sehari-hari. Kontribusinya terhadap pemahaman sejarah bukan sekadar memberikan catatan kronologis, melainkan juga menyoroti nilai-nilai kemanusiaan dan budaya yang relevan hingga sekarang. Kitab Furu' Al-Makmur bukan hanya mengajarkan mengenai masa lalu, tetapi juga memupuk apresiasi terhadap warisan budaya, menciptakan ikatan historis yang mencerahkan pemahaman kita tentang perjalanan masyarakat Islam di Kerajaan Riau-Lingga. Dengan relevansinya yang kontemporer, Kitab Furu' Al-Makmur menjadi sebuah pedoman berharga bagi masyarakat masa kini dalam menerapkan prinsip-prinsip moral dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai sumber inspirasi, kitab ini menerangi jalan menuju penerapan nilai-nilai kemanusiaan dan etika yang tidak hanya relevan secara sejarah, tetapi juga mendukung pembangunan masyarakat yang beradab dan harmonis.

## REFERENSI

- Amin, F. (2023). Nilai Pancasila dalam Metode Penemuan Hukum: Orientasi dan Konstruksi Nilai Pancasila dalam Rechtsvinding. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 299–314. <https://doi.org/10.30656/AJUDIKASI.V7I2.7655>
- Anastasia Wiwik Swastiwi. (2021). Aktivitas Perdagangan Kerajaan Riau-Lingga Abad 18-20: Historiografi Pantai Timur Sumatera. *Prosiding Seminar Nasional Humaniora*, 1, 1–15. Retrieved from <https://www.conference.unja.ac.id/SNH/article/view/111>
- Civilization, I., TEMA 19, & Domenico, E. (2021). *NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PROVINSI RIAU*. 6.
- Dinda, N., Bina Imania, H., & Penulis, K. (2022). Implementasi Pengukuhan Akhlak Melalui Pendidikan Anti Korupsi Dalam Kajian Agama Islam. *Ganesha Civic Education Journal*, 4(1), 195–207. Retrieved from <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GANCEJ/article/view/1802>
- Fakhriah, S., Taufiq, M., Qosim, S., Hukum, F., & Muhammadiyah, U. (2023). Intelektualisme Hukum Islam di Nusantara Abad-19. *JIMPS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(3), 916–931.
- Firmansyah, D., & Dede. (2022). Teknik Pengambilan Sampel Umum dalam Metodologi Penelitian: Literature Review. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH)*, 1(2), 85–114. <https://doi.org/10.55927/jiph.v1i2.937>
- Hafiz, M., & Tafsiruddin. (2022). Masyarakat Melayu Riau Berbudaya. *Dakwatul Islam*, 6(2), 89–96. <https://doi.org/10.46781/DAKWATULISLAM.V6I2.505>
- Halim, A., & Alpi, M. A. (2023). Peninggalan Kesultanan Islam Di Tanah Melayu Sebuah Pembaruan Pendidikan Islam Dan Tamadun Melayu. *Jurnal Arriyadhah*, XX(Ii), 49–55.
- Handoyo, H., & Supriyanto, S. (2023). Relasi Agama Dan Negara Perspektif Pemikiran Islam Dalam Konteks Ke Indonesiaan. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 0(0), 245–257. <https://doi.org/10.30595/ISLAMADINA.V0I0.14222>
- Hidayat, A. A. (2014). *Studi Kawasan Muslim Minoritas Asia Tenggara*. Bandung: Pustaka Rahmat.
- Hidayat, A. A., Samsuddin, Rusmana, D., & Hakim, A. (2014). *Studi Islam di Asia Tenggara*.

- Bandung: Pustaka Setia. Retrieved from //senayan.iain-palangkaraya.ac.id/index.php?p=show\_detail&id=11981&keywords=
- HIDAYAT, N. 92004 / S. (2008). *AKULTURASI ISLAM DAN BUDAYA MELAYU: Studi Tentang Ritus Siklus Orang Melayu di Pedalaman Riau*.
- Htn, B. :, & Han, /. (2021). *Politik Hukum Pengelolaan Zakat Di Indonesia (Studi Tentang Zakat Untuk Mengentaskan Kemiskinan)*. Retrieved from <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/34476>
- Jaenullah, Ferdian Utama, D. S. (2022). Resilience Model of the Traditional Islamic Boarding School Education System in Shaping the Morals of Student in the Midst of Modernizing Education. *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian Dan Kajian Kepustakaan Di Bidang Pendidikan, Pengajaran Dan Pembelajaran*, 8(4), 931–942. <https://doi.org/https://doi.org/10.33394/jk.v8i4.6013>
- Jannati, Z., Rusli, R., & Mardiah, A. (2021). Konsep Islam Melayu dan Islam Nusantara. *Wardah*, 22(2), 16–35. <https://doi.org/10.19109/WARDAH.V22I2.10825>
- Khairunnas Jamal Idris Harun. (2015). Inventarisasi Naskah Klasik Kerajaan Lingga. *Sosial Budaya*, 11(1), 55–69. <https://doi.org/10.24014/SB.V11I1.826>
- Khobiburrohma, E. N., Khobiburrohma, E. N., Margareta, P. S., & Hasbullah, M. H. (2020). Penerapan Sistem Merit Dalam Birokrasi Indonesia Untuk Mewujudkan Good Governance. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 3(2), 139–148. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v3i2.900>
- Koestoro, L. P. (2017). Situs Kota Rebah Di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau: Pertapakan Istana Atau Bangunan Lain. *Berkala Arkeologi SANGKHALA*, 18(2), 128. <https://doi.org/10.24832/sba.v18i2.13>
- Lancang, U., & Riau, K. (2016). Penerapan Sanksi Adat Melayu Kerajaan Siak Sri Indrapura Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 1(2), 291–314. <https://doi.org/10.25217/JF.V1I2.16>
- Lazim, M. (2020). Corak Pemikiran Politik Raja Ali Haji (1808-1873). *Perada*, 2(2), 153–174. <https://doi.org/10.35961/perada.v2i2.43>
- Lexy J. Moleong. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Maryamah, M. (2016). Tradisi Ilmiah dalam Peradaban Islam Melayu. *Tadrib*, 2(2), 238–250. Retrieved from <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Tadrib/article/view/1170>
- Mohamad Ali, R., & Ariffin, K. (2020). Peranan dan Penglibatan Orang Laut Johor-Riau semasa Era Kerajaan Melayu Tradisional. *Melayu: Jurnal Antarabangsa Dunia Melayu*, 13(1), 1–24. [https://doi.org/10.37052/jm.13\(1\)no1](https://doi.org/10.37052/jm.13(1)no1)
- Natuna, U., & Sabli, N. (2022). Dinamika Sejarah: Rasa dan Asa Masyarakat Segeram Dalam Arus Sejarah Natuna. *Jurnal Segeram*, 1(1), 2022. <https://doi.org/10.56783/JS.V1I1.2>
- Pertiwi, E., Folar, K., Farhana, W. A., & Alam, M. E. N. (2022). Problematika Moral Bangsa Terhadap Etika Masyarakat. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 4(2), 1–11. <https://doi.org/10.52005/RECHTEN.V4I2.96>
- Politik, M. J., Humaniora, H., Yusril, M., Dayrobi, M., Harahap, H. H., & Fuad, Z. (2024). Analisis Polarisasi Dualisme dan Pluralisme Hukum Islam di Indonesia. *MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(1), 262–271.
- Rafiqi, R. (2019). Tanah Grant Sultan Melayu Deli menurut Teori Positivistik. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6(2), 102–107. <https://doi.org/10.31289/JIPH.V6I2.2289>
- Rahmat, S. (2019). Bugis di Kerajaan Melayu: Eksistensi Orang Bugis dalam Pemerintahan Kerajaan Johor-Riau-Lingga-Pahang. *PERADA*, 2(1), 35–44. <https://doi.org/10.35961/PERADA.V2I1.25>
- Rahmat, S., Amin, R., Dilfa Riana, R., Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Ceruk ijuk, S., Lintas Bar, J. K., Bintan, K., & Riau, K. (2021). Agama Masyarakat Suku Laut Kampung Panglong Desa Berakit, Kabupaten Bintan (1965-2011). *Tsaqofah Dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan Dan Sejarah Islam*, 6(1), 85–97. <https://doi.org/10.29300/TTJKSI.V6I1.4474>

- Rina Rehayati, I. F. (2017). Transmisi Islam Moderat Oleh Raja Ali Haji di Kesultanan Riau-Lingga pada Abad Ke-19. *Jurnal Ushuluddin*, 25(2), 172–187. <https://doi.org/10.24014/JUSH.V25I2.3890>
- Samin. (2017). Suatu Study Tentang Sumber-Sumber Hukum Adat Melayu Serumpun. *Unimel.Edu.My*, 1–139. Retrieved from [https://unimel.edu.my/fss/images/UNILAK\\_Article\\_Compilation\\_1.pdf](https://unimel.edu.my/fss/images/UNILAK_Article_Compilation_1.pdf)
- Siregar, M. (2023). Dunia Islam Abad ke 19, 20, 21 dan Islamisasi Nusantara. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia*, 2(1), 1–10. Retrieved from <https://jpion.org/index.php/jpi/article/view/90>
- Sucipta, P. R. (2019). The General Principles of Good Governance in the Mind of Raja Ali Haji. *Jurnal Hukum Peratun*, 2(2), 259–274.
- Sucipto, H., Sitingjak, S., & Sujatmoko, I. (2023). Analisis Dinasti Politik di Indonesia: Dilema Etika Demokrasi dan Relevansinya dalam Keadilan Politik Indonesia. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 1(3), 83–90. <https://doi.org/10.572349/KULTURA.V1I3.317>
- Syamsuadi, A. (2018). Membangun Demokrasi Pemerintahan Di Riau Dalam Perspektif Budaya Melayu. *JDP (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN)*, 1(1), 1–10. Retrieved from <https://jurnal.univrab.ac.id/index.php/jdp/article/view/342>
- Syu'aib, K., & Hanafi, I. (2019). PARARUSYDIYAH: Potret Dinamika Pemikiran Islam Melayu. *Nusantara; Journal for Southeast Asian Islamic Studies*, 14(2). <https://doi.org/10.24014/NUSANTARA.V14I2.7155>
- Tabri, M., Fatia, A., & Hakim, L. (2023). Sejarah Dan Peradaban Islam Pada Zaman Klasik. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 1(2), 842–855. Retrieved from <https://journal.banjaresepacific.com/index.php/jimr/article/view/123>
- Ulya, M. (2020). *Budaya Melayu Riau Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Doctoral dissertation, Institut PTIQ Jakarta.
- Wan Ahmad Fauzi Wan Husain, Anisah Che Ngah, & Mohamed Anwar Omar Din. (2018). Konsep Kedaulatan dalam Hukum Kanun Melaka (The Concept of Sovereignty in Hukum Kanun Melaka). *Jurnal Undang-Undang Dan Masyarakat*, 22(May 2021), 61–73. Retrieved from <https://doi.org/10.17576/juum-2018-22-07>
- Yulianty, M. (2005). Partisipasi Masyarakat dalam memelihara Benda Cagar Budaya di Pulau Penyengat Sebagai Upaya Pelestarian Warisan Budaya Melayu. *Tesis*, 1–146.
- 

**Copyright Holder :**

© Asep Achmad Hidayat, Syofiah Pribadi, Fitria Eka Dewi Murni,. (2024).

**First Publication Right :**

© Jurnal Tana Mana

**This article is under:**

